

# Peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo dalam Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)

Oleh:

Zakaria Evendi

Isna Fitria Agustina

Administrasi Publik

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

September 2023



# Pendahuluan

- Pembangunan ekonomi sering diartikan sebagai serangkaian usaha untuk mengembangkan kegiatan ekonomi sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan semakin berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat. Implikasinya perkembangan ekonomi diharapkan menambah kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat menjadi semakin tinggi. Proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan (*growth plus change*). Perubahan pertama berupa perubahan struktur ekonomi dari pertanian menuju industri atau jasa. Kedua, perubahan kelembagaan baik lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan itu sendiri. Potensi ekonomi suatu daerah menggambarkan sejauh mana berbagai sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki suatu daerah memiliki kekuatan dalam memberikan kontribusi produktif terhadap pembangunan ekonomi. Sumber daya alam (SDA) meliputi pertanian, perikanan/kelautan, dan pertambangan. Sedangkan potensi sumber daya manusia (SDM), selain dalam jumlah penduduk juga jumlah pekerja.

# Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peran dinas tenaga kerja dalam penetapan UMK di Sidoarjo ?
2. Kendala Dinas Tenaga Kerja dalam penetapan UMK di Sidoarjo?

# Metode

- Dalam penelitian mengenai Peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo dalam Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Penelitian bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena yang berkaitan dengan Peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo dalam Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.
- Penelitian ini teknik penentuan informan dengan menggunakan teknik purposive sampling yang digunakan dapat sebagai sumber informasi berdasarkan pertimbangan tertentu. Informan dalam peneliti ini yaitu serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah.
- Teknik pengumpulan data dapat diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jenis data yaitu : (1) Data Primer, data yang diperoleh dari sumber data secara langsung, dicatat dan diamati, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data Sekunder, data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti, sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah diperoleh melalui jurnal dan sumber data dari media massa.
- Dalam penelitian ini penulis menggunakan aliran analisis data dari teori Milles dan Huberman, yaitu Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi.

# Hasil

- Dalam pelaksanaan kebijakan UMK di Kabupaten Sidoarjo, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi. Salah satunya adalah keterbatasan kewenangan Disnaker dalam melakukan inspeksi langsung terhadap perusahaan formal yang membayar upah di bawah UMK yang berlaku. Akibatnya, ketika terdapat ketidaksesuaian dalam pembayaran upah kepada karyawan, Disnaker hanya dapat memberikan saran dan himbauan kepada perusahaan untuk mematuhi peraturan pemerintah. Selain itu, Disnaker juga harus mempertimbangkan masalah ini dengan cermat dan berusaha mencari solusi agar penetapan upah minimum dapat diterima dengan baik tanpa memberatkan kedua belah pihak.

# Pembahasan

Secara umum, penelitian ini adalah untuk menganalisis Peran Dinas Sosial Kabupaten Sidarjo dalam penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sidoarjo berdasarkan Penyederhanaan Birokrasi melalui tahapan a) Peran sebagai fasilitator, b) Peran sebagai regulator, c) Peran sebagai katalisator.

- **Peran sebagai fasilitator.** Peran pemerintah utama adalah peran sebagai fasilitator. Fasilitator adalah penyediaan fasilitas guna mencapai tujuan tertentu
- **Peran sebagai regulator.** Peranan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo terhadap penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Sidoarjo sebagai regulator sudah cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari peranan Dinas Tenaga Kerja Kab. Sidoarjo dalam melaksanakan regulasi tentang penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sidoarjo.
- **Peran sebagai katalisator.** Peranan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo terhadap penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Sidoarjo sebagai katalisator sudah cukup baik. Upaya yang dilakukan oleh Peranan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo dalam membuat perbaikan dan perubahan. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo melakukan kerjasama dan mengakomodir segala bentuk aspirasi maupun masukan dengan adanya pertemuan secara tripartit dan bipartit

# Temuan Penting Penelitian

- Terkait dengan pembinaan, di mana perusahaan seringkali memberikan berbagai alasan ketika diminta keterangan terkait pemenuhan UMK atau saat dilakukan audit oleh Dinas Tenaga Kerja. Bahkan, beberapa perusahaan telah mempersiapkan diri jauh-jauh hari sebelum audit oleh Disnaker sehingga mereka dapat memanipulasi data yang akan disampaikan kepada pihak Disnaker, sehingga pengawasan dan pembinaan menjadi lebih sulit dilakukan. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpatuhan hukum dalam pembayaran upah kepada karyawan. Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan juga menghadapi hambatan, terkadang tidak sesuai dengan rencana karena munculnya berbagai kendala, termasuk ketidaksesuaian dalam laporan atau informasi yang diberikan oleh beberapa karyawan. Hal ini membuat pengawas ketenagakerjaan bingung dalam menindaklanjuti masalah di perusahaan tersebut. Bahkan, Disnaker sendiri merasa kesulitan dalam memberikan sanksi pidana yang sesuai bagi perusahaan yang melanggar aturan pemerintah.

# Manfaat Penelitian

## Manfaat Teoritis

- Bagi akademik, memberikan hasil pemikiran serta tambahan ilmu pengetahuan kepada dalam bidang upah minimum kabupaten atau kota (UMK) Di Kabupaten Sidoarjo
- Bagi peneliti, dapat menambah wawasan mengenai upah minimum kabupaten atau kota (UMK) di kabupaten Sidoarjo

## Manfaat Praktis

- Bagi pemerintah, dapat dijadikan rekomendasi kepada para pemangku kebijakan untuk mengambil keputusan yang tepat
- Bagi masyarakat, dapat menjadi wawasan untuk dijadikan pertimbangan dengan melihat peluang.

# Referensi

- [1]. G. Diva, “Mengembangkan UMKM Melalui Pemberdayaan Peran Pemerintah Daerah,” Jakarta: Bakrie School of Management, 2009.
- [2]. N. Apriliyanti, M. N. Yamin, and A. C. Nur, “Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Pengemis di Kota Makasar,” *J. Ilmu Sociol. Dialekt. Kotemporer*, vol. 9, no. 2, pp. 81–90, 2020, doi: 23032324.
- [3]. H. C. Prastika, “Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Upaya Pengembangan Kerajinan Kulit di Kabupaten Magetan,” Universitas Airlangga, 2017.
- [4]. Sane’a and I. F. Agustina, “Peran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo dalam Pemberdayaan Anak Jalanan di Kecamatan Sidoarjo,” *JKMP (Jurnal Kebijak. dan Manaj. Publik)*, vol. 2, no. 1, pp. 43–52, 2014, doi: 10.21070/jkmp.v2i1.407.
- [5]. [Disnaker.sidoarjokab.go.id](https://disnaker.sidoarjokab.go.id), “Visi dan Misi.”  
<https://disnaker.sidoarjokab.go.id/?page=visi-misi>.

